



PENGARUH PERUBAHAN TARIF, TINGKAT PENGHASILAN, DAN DISTRIBUSI SPPT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BULELENG

Supian Susanti^{1*}, I Gede Putu Banu Astawa², & Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi³

^{*1-3}Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha

*e-Mail: supian@student.undiksha.ac.id

Submit Tgl: 31-Mei-2026

Diterima Tgl: 04-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 07-Juni-2026

Abstract: This study aims to examine the effect of changes in tax rates, income levels, and SPPT distribution on PBB-P2 revenue. This research applies a quantitative approach with a causal research design. The population of this study includes all PBB-P2 taxpayers in Buleleng Regency in 2024, totaling 301.966 taxpayers. A sample of 119 respondents was selected using a purposive sampling technique. Data were collected through the direct distribution of questionnaires and were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 27. The results indicate that (1) changes in tax rates have a positive and significant effect on PBB-P2 revenue, (2) income level also has a positive and significant effect on PBB-P2 revenue, and (3) SPPT distribution has a positive and significant effect on PBB-P2 revenue. These findings suggest that more appropriate tariff policies, higher income levels of taxpayers, and more optimal SPPT distribution are associated with increased PBB-P2 revenue.

Keywords: Tariff Changes; Income Level; SPPT Distribution; PBB-P2 Revenue

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif, tingkat penghasilan, dan distribusi SPPT terhadap penerimaan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebanyak 301.966 wajib pajak, dengan sampel sebanyak 119 responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden, kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perubahan tarif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB-P2, (2) tingkat penghasilan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB-P2, dan (3) distribusi SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tepat kebijakan perubahan tarif, semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak, serta semakin optimal distribusi SPPT, maka penerimaan PBB-P2 akan semakin meningkat.

Kata Kunci: Perubahan Tarif; Tingkat Penghasilan; Distribusi SPPT; Penerimaan PBB-P2

Cara mengutip

Susanti, S., Astawa, I. G. P. B., & Dewi, N. A. W. T. (2026). Pengaruh Perubahan Tarif, Tingkat Penghasilan, dan Distribusi SPPT terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1626–1641. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1945>

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah (Paramananda & Diatmika, 2025). Kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah (Dewi dkk., 2025). Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan (Putri, 2025). Pengelolaan PBB-P2 diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah (Trisnayani, 2024).

Di Kabupaten Buleleng, pengelolaan PBB-P2 mulai dilaksanakan secara resmi pada tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Saputra & Putra, 2022). Kabupaten Buleleng memiliki potensi penerimaan PBB-P2 yang besar karena merupakan wilayah terluas di Provinsi Bali dengan luas mencapai 1.322,68 km². Menurut Tiara (2020), luas lahan dan bangunan merupakan faktor yang memengaruhi besarnya penerimaan PBB-P2 sehingga potensi tersebut dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah apabila dikelola secara optimal.

Berdasarkan data BPKPD Kabupaten Buleleng, PBB-P2 merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Data realisasi pajak daerah Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

Pajak Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Hotel	8,586,985	7,574,891	18,099,354	44,208,639	58,706,808
Restoran	7,751,569	9,209,966	19,678,202	32,390,596	43,043,120
Hiburan	499,385	309,457	902,682	2,512,592	4,825,908
Reklame	1,940,465	2,760,964	3,110,223	2,920,288	3,053,776
PPJ	39,510,336	38,906,580	43,232,828	47,221,395	53,367,342
Parkir	23,400	13,756	17,776	60,190	84,567
Air Tanah	1,380,498	1,489,382	1,460,010	1,516,453	1,713,480
Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Mineral Bukan Logam dan Batuan	24,856	91,927	77,628	106,369	74,315
PBB-P2	22,395,521	24,663,891	25,980,118	26,688,518	21,295,960
BPHTB	36,144,302	51,689,586	60,131,174	63,918,841	65,773,882

(Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng, 2025)

Berdasarkan Tabel 1, PBB-P2 merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024. Meskipun demikian, realisasi penerimaan PBB-P2 belum menunjukkan tren yang stabil dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 belum sepenuhnya stabil. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi penerimaan PBB-P2, berikut disajikan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Buleleng tahun 2020–2024.

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	18.250.000.000,00	22.395.503.762,24	122,72%
2021	27.050.000.000,00	24.663.891.714,97	91,18%
2022	27.000.000.000,00	25.980.118.871,43	96,22%
2023	25.000.000.000,00	26.688.518.489,95	106,75%
2024	24.000.000.000,00	21.295.960.892,71	88,73%

(Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng, 2025)

Berdasarkan Tabel 2, capaian realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Buleleng menunjukkan kondisi yang beragam selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan mencapai 122,72% dari target yang ditetapkan. Namun, capaian tersebut menurun menjadi 91,18% pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 96,22% pada tahun 2022 serta 106,75% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian realisasi kembali menurun menjadi 88,73% meskipun target penerimaan telah diturunkan.

Menurut informasi dari Kepala Bidang Penagihan BPKPD Kabupaten Buleleng, I Gusti Putu Sudiana, S.E., M.A.P., terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi penerimaan PBB-P2, yaitu perubahan tarif PBB-P2, tingkat penghasilan masyarakat, dan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Perubahan tarif dilakukan sebagai bentuk keringanan pajak kepada masyarakat, sedangkan tingkat penghasilan masyarakat yang relatif rendah menyebabkan kemampuan membayar pajak masih terbatas. Selain itu, distribusi SPPT juga mengalami kendala akibat ketidaksesuaian data dan pemilik objek pajak yang tidak berada di alamat terdaftar sehingga menghambat penyampaian SPPT kepada wajib pajak.

Keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga pencapaian target penerimaan pajak perlu didukung oleh upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan dapat dicapai secara optimal dan efisien (Ellitan, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk perilaku individu sehingga pemahamannya memerlukan pendekatan perilaku (Kesek dkk., 2025). Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. TPB menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku berkaitan dengan penilaian individu terhadap suatu tindakan, norma subjektif berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku individu, sedangkan persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan individu mengenai kemampuan dan kemudahan dalam melakukan suatu tindakan.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi penerimaan PBB-P2 adalah perubahan tarif pajak. Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan penyesuaian tarif PBB-P2 melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk keringanan kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Dalam perspektif TPB, perubahan tarif berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak yang menganggap tarif pajak lebih ringan cenderung memiliki sikap positif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian (Tasmita & Dahniar, 2022), Darmayani (2023), dan Rahmadhani (2023) menunjukkan bahwa perubahan tarif berpengaruh terhadap penerimaan maupun kepatuhan wajib pajak. Namun, (Meita & Nurdiniah, 2023) menemukan bahwa perubahan tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif masih layak dijadikan variabel penelitian.

Selain perubahan tarif, tingkat penghasilan juga diduga memengaruhi penerimaan PBB-P2. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Buleleng termasuk wilayah dengan persentase penduduk miskin tinggi setelah Karangasem, yaitu 5,19 persen pada 2019, meningkat menjadi 5,32 persen pada 2020, dan terus naik hingga 6,21 persen pada 2022 (Putra & Yasa, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki tingkat penghasilan yang relatif rendah sehingga kemampuan membayar pajak juga terbatas. Dalam perspektif TPB, tingkat penghasilan berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak, maka semakin besar kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2. Penelitian Marpaung dkk. (2023), Ahmad dkk. (2024), Indriany dkk. (2024), dan Maulana (2025) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan maupun penerimaan PBB. Namun, Mustofa (2020) menemukan hasil yang berbeda. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghasilan masih layak dijadikan variabel penelitian.

Faktor lain yang diduga memengaruhi penerimaan PBB-P2 adalah distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT merupakan sarana penyampaian informasi mengenai besaran pajak terutang dan batas waktu pembayaran kepada wajib pajak. Distribusi SPPT yang tepat waktu dan tepat sasaran dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Sebaliknya, keterlambatan distribusi maupun ketidaksesuaian data SPPT dapat menghambat pembayaran pajak dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif TPB, distribusi SPPT berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku karena memengaruhi kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian Hidayah & Suryono (2021), Prastyantini & Rizki (2022), dan Tauhid dkk. (2025) menunjukkan bahwa distribusi SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan maupun penerimaan PBB-P2. Namun, Fazhillah dkk. (2024) menemukan bahwa SPPT berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa distribusi SPPT masih layak dijadikan variabel penelitian. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh perubahan tarif, tingkat penghasilan, dan distribusi SPPT terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PBB-P2.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji pengaruh Perubahan Tarif (X1), Tingkat Penghasilan (X2), dan Distribusi SPPT (X3) terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y) di Kabupaten Buleleng tahun 2024. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis secara statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian (Sugiyono, 2022).

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Buleleng, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen BPKPD Kabupaten Buleleng serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner dan studi kepustakaan. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer melalui penyebaran secara langsung kepada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan skala *Likert* lima poin. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Buleleng tahun 2024 yang berjumlah 301.966 wajib pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 119 responden. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kabupaten Buleleng, telah menerima SPPT PBB-P2, dan telah membayar kewajiban PBB-P2.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian beserta indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan instrumen penelitian sehingga pengukuran variabel dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis (Handriyani & Astawa, 2022). Adapun indikator variabel penelitian disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Perubahan Tarif (X1)	Indikator perubahan tarif dalam penelitian ini meliputi kesesuaian perubahan tarif pajak, besarnya pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil, sikap wajib pajak setelah adanya penurunan tarif pajak, serta persepsi wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak (Ramadhani, 2023).
Tingkat Penghasilan (X2)	Indikator tingkat penghasilan dapat diukur melalui kemampuan wajib pajak dalam membayar besarnya pajak yang dikenakan, ketaatan membayar pajak meskipun pendapatan rendah, kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan utama sekaligus kewajiban perpajakan, serta besarnya penghasilan yang tidak menjadi penghalang dalam membayar pajak (Marpaung dkk., 2023).
Distribusi SPPT (X3)	Indikator distribusi SPPT dalam penelitian ini meliputi kejelasan isi SPPT, ketepatan penyampaian SPPT, serta fungsi SPPT sebagai pemberitahuan kewajiban pajak (Khairunnisa, 2025).

(Sumber : Data Diolah Peneliti (2026))

Teknik Analisis Data

Analisis data diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data penelitian. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kuesioner layak digunakan, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Analisis data kemudian dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t dan *koefisien determinasi* (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi sehingga memudahkan peneliti dalam memahami distribusi data penelitian (Trisnayani, 2024). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perubahan Tarif (X1), Tingkat Penghasilan (X2), Distribusi SPPT (X3), dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Perubahan Tarif (X1)	119	9,00	20,00	15,6975	2,21916
Tingkat Penghasilan (X2)	119	11,00	20,00	15,8487	2,24227
Distribusi SPPT (X3)	119	7,00	15,00	11,7563	1,99986
Penerimaan PBB-P2 (Y)	119	8,00	15,00	11,8319	1,57480

(Sumber : Data Diolah Peneliti (2026))

Berdasarkan Tabel 4, variabel Perubahan Tarif, Tingkat Penghasilan, dan Distribusi SPPT memiliki nilai rata-rata masing-masing sebesar 15,70; 15,85; dan 11,76 dengan standar deviasi sebesar 2,22; 2,24; dan 2,00. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung terkonsentrasi dan tidak memiliki penyimpangan yang tinggi. Variabel Penerimaan PBB-P2 memiliki nilai rata-rata

sebesar 11,83 dengan standar deviasi 1,57, yang menunjukkan bahwa data relatif homogen. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap Perubahan Tarif, Tingkat Penghasilan, dan Distribusi SPPT tergolong baik dan relatif seragam sehingga mendukung peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng.

Hasil Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (0,5). Penelitian ini menggunakan metode korelasi Pearson dengan ketentuan bahwa butir pernyataan atau indikator dinyatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, bernilai positif dan memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ (Canberra & Dewi, 2025). Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 119 orang, sehingga nilai r_{tabel} diperoleh $df=n-2$, yaitu $119-2=117$. Dengan demikian, nilai r_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 0,180. Pengujian selengkapannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig.	Keterangan
Perubahan Tarif (X1)	X1.1	0,759	0,180	0,000	Valid
	X1.2	0,787	0,180	0,000	Valid
	X1.3	0,772	0,180	0,000	Valid
	X1.4	0,771	0,180	0,000	Valid
Tingkat Penghasilan (X2)	X2.1	0,797	0,180	0,000	Valid
	X2.2	0,691	0,180	0,000	Valid
	X2.3	0,845	0,180	0,000	Valid
	X2.4	0,800	0,180	0,000	Valid
Distribusi SPPT (X3)	X3.1	0,861	0,180	0,000	Valid
	X3.2	0,861	0,180	0,000	Valid
	X3.3	0,863	0,180	0,000	Valid
Penerimaan PBB-P2 (Y)	Y.1	0,747	0,180	0,000	Valid
	Y.2	0,825	0,180	0,000	Valid
	Y.3	0,749	0,180	0,000	Valid

(Sumber: Data Diolah Peneliti (2026))

Berdasarkan hasil pada Tabel Uji Validitas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu Perubahan Tarif (X1), Tingkat Penghasilan (X2), dan Distribusi SPPT (X3), serta variabel terikat yaitu Penerimaan PBB-P2 (Y) dinyatakan valid. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,180 pada taraf signifikansi 5% (0,05), serta seluruh nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keandalan suatu instrumen penelitian sehingga dapat dipercaya dalam mengukur variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik Cronbach's Alpha dengan ketentuan bahwa suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ (Setyaedhi, 2024). Berikut hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Perubahan Tarif (X1)	0,772	Reliabel
Tingkat Penghasilan (X2)	0,791	Reliabel
Distribusi SPPT (X3)	0,826	Reliabel
Penerimaan PBB-P2 (Y)	0,666	Reliabel

(Sumber: Data Diolah Peneliti (2026))

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Variabel Perubahan Tarif (X1) memperoleh nilai sebesar 0,772, Tingkat Penghasilan (X2) sebesar 0,791, Distribusi SPPT (X3) sebesar 0,826, dan Penerimaan PBB-P2 (Y) sebesar 0,666. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel karena memiliki tingkat konsistensi yang baik. Dengan demikian, instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak (Sintia dkk., 2022). Penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan kriteria bahwa data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$, sedangkan nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>	119
<i>Test Statistic</i>	0,065
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 (Andwika & Suarmanayasa, 2025).

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Perubahan Tarif (X1)	0,800	1,250	Tidak terjadi multikolinearitas
Tingkat Penghasilan (X2)	0,805	1,242	Tidak terjadi multikolinearitas
Distribusi SPPT (X3)	0,903	1,108	Tidak terjadi multikolinearitas

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan *uji Glejser* dengan kriteria bahwa model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi > 0,05 (Canberra & Dewi, 2021). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
Perubahan Tarif (X1)	0,507	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat Penghasilan (X2)	0,490	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Distribusi SPPT (X3)	0,883	Tidak terjadi heteroskedastisitas

(Sumber : Data Diolah Peneliti,2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, variabel Perubahan Tarif (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,507, Tingkat Penghasilan (X2) sebesar 0,490, dan Distribusi SPPT (X3) sebesar 0,883. Seluruh nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan apabila penelitian memiliki lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh antarvariabel yang diteliti (Suardewa et al., 2024). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	2,045	0,962	-	2,125	0,036
Perubahan Tarif (X1)	0,320	0,053	0,451	6,025	0,000
Tingkat Penghasilan (X2)	0,188	0,052	0,267	3,587	0,000
Distribusi SPPT (X3)	0,152	0,055	0,193	2,744	0,007

a. Dependent Variable: Penerimaan PBB-P2 (Y)

(Sumber: Data Diolah Peneliti,2026)

Pada output ini ditampilkan nilai koefisien dari persamaan regresi. Adapun persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 2,045 + 0,320X_1 + 0,188X_2 + 0,152X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Penerimaan PBB-P2)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi untuk X_1

X_1 = Variabel bebas (Perubahan Tarif)

β_2 = Koefisien regresi untuk X_2

X_2 = Variabel bebas (Tingkat Penghasilan)

β_3 = Koefisien regresi untuk X_3

X_3 = Variabel bebas (Distribusi SPPT)

ε = Error

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, interpretasi model dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Nilai konstanta sebesar 2,045 menunjukkan bahwa apabila variabel Perubahan Tarif (X_1), Tingkat Penghasilan (X_2), dan Distribusi SPPT (X_3) bernilai nol, maka Penerimaan PBB-P2 (Y) tetap sebesar 2,045.
- B. Koefisien Perubahan Tarif (β_1) sebesar 0,320 menunjukkan pengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y), artinya setiap kenaikan satu satuan Perubahan Tarif akan meningkatkan Penerimaan PBB-P2 sebesar 0,320.
- C. Koefisien Tingkat Penghasilan (β_2) sebesar 0,188 menunjukkan pengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y), sehingga setiap kenaikan satu satuan Tingkat Penghasilan akan meningkatkan Penerimaan PBB-P2 sebesar 0,188.
- D. Koefisien Distribusi SPPT (β_3) sebesar 0,152 menunjukkan pengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y), artinya setiap kenaikan satu satuan Distribusi SPPT akan meningkatkan Penerimaan PBB-P2 sebesar 0,152.

Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	$\alpha=5\%$	Keterangan
Perubahan Tarif (X_1)	6,025	1,658	0,000	0,05	Signifikan
Tingkat Penghasilan (X_2)	3,587	1,658	0,000	0,05	Signifikan
Distribusi SPPT (X_3)	2,744	1,658	0,007	0,05	Signifikan

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Dengan tingkat signifikansi 5% dan $df = 115$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,658. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$.
- B. Variabel Perubahan Tarif (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $6,025 > 1,658$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, Perubahan Tarif berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2.

- C. Variabel Tingkat Penghasilan (X2) memiliki nilai thitung sebesar $3,587 > 1,981$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan demikian, Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2.
- D. Variabel Distribusi SPPT (X3) memiliki nilai thitung sebesar $2,744 > 1,658$ dengan signifikansi $0,007 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dengan demikian, Distribusi SPPT berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan model semakin baik dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,697	0,485	0,472	1, 14462

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,472. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Perubahan Tarif, Tingkat Penghasilan, dan Distribusi SPPT mampu menjelaskan Penerimaan PBB-P2 sebesar 47,2%, sedangkan sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Penerimaan PBB-P2 DI Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, variabel Perubahan Tarif memiliki koefisien regresi sebesar 0,320 yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 6,025 lebih besar dari ttabel sebesar 1,981 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Perubahan Tarif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior, khususnya pada aspek *attitude toward behavior*, yang menjelaskan bahwa sikap atau penilaian individu dapat memengaruhi niat dan perilaku dalam melaksanakan suatu tindakan (Martadinata & Yasa, 2022). Dalam konteks perpajakan, tarif yang dianggap sesuai dan tidak memberatkan akan membentuk sikap positif wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan dalam membayar pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tasmita dan Dahniar (2022), Darmayani (2023), serta Ramadhani (2023) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, variabel Tingkat Penghasilan memiliki koefisien regresi sebesar 0,188 yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 3,587 lebih besar dari ttabel sebesar 1,981 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak, maka semakin besar kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, khususnya pada aspek *perceived behavioral control*, yang menjelaskan bahwa persepsi individu mengenai kemampuan dan kontrol dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat memengaruhi niat serta perilaku kepatuhan wajib pajak (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Dalam penelitian ini, tingkat penghasilan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak, maka semakin besar kemampuan yang dirasakan untuk membayar pajak tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Marpaung dkk. (2023), Ahmad dkk. (2024), Indriany dkk. (2024), dan Maulana (2025) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak.

Pengaruh Distribusi SPPT Terhadap Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, variabel Distribusi SPPT memiliki koefisien regresi sebesar 0,152 yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 2,744 lebih besar dari ttabel sebesar 1,981 serta nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Distribusi SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi SPPT yang dilakukan secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, khususnya pada aspek *perceived behavioral control*, yang menjelaskan bahwa kemudahan atau kemampuan yang dirasakan individu dalam melakukan suatu perilaku dapat memengaruhi niat dan perilaku seseorang (Yasa et al., 2021). Dalam penelitian ini, distribusi SPPT yang jelas dan tepat waktu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memahami besaran pajak dan batas waktu pembayaran sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hidayah dan Suryono (2021), Prastyantini dan Rizki (2022), serta Tauhid dkk. (2025) yang menyatakan bahwa distribusi SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Tarif, Tingkat Penghasilan, dan Distribusi SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian tarif yang sesuai, tingkat penghasilan wajib pajak yang memadai, serta distribusi SPPT yang jelas dan tepat waktu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPKPD Kabupaten Buleleng
BPKPD Kabupaten Buleleng disarankan untuk meningkatkan kejelasan informasi yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Saran ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa indikator kejelasan informasi dalam SPPT memperoleh nilai rata-rata terendah pada variabel Distribusi SPPT, yang juga merupakan variabel dengan pengaruh paling rendah terhadap penerimaan PBB-P2.
2. Bagi Wajib Pajak
Wajib pajak diharapkan memanfaatkan kebijakan perubahan tarif PBB-P2 yang ditetapkan pemerintah dengan tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penerimaan PBB-P2, seperti efisiensi administrasi perpajakan dan efektivitas sosialisasi perpajakan, mengingat masih terdapat 52,7% variasi penerimaan PBB-P2 yang dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian ini. Selain itu, jumlah sampel, cakupan wilayah penelitian, dan metode pengumpulan data dapat diperluas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., Suryani, N., & Putri, D. A. (2024). Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 6(1), 45–56.
- Andwika, I. G. A. S., & Suarmanayasa, I. N. (2025). Pengaruh disiplin kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan SPX Buleleng Hub. *Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 713–722. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v7i2.96005>
- Canberra, L. G. W., & Dewi, G. A. K. R. S. (2025). Pengaruh modal kerja, lama usaha, serta penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM bidang fashion di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(1). <https://doi.org/10.23887/jipppg.v3i2>
- Darmayani, N. L. P. (2023). Pengaruh perubahan tarif PPh final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(2), 215–224.

- Dewi, C., & Dewi, N. P. (2021). Pengaruh profitabilitas, growth, leverage terhadap earning response coefficient studi pada perusahaan property & real estate yang terdaftar di BEI tahun 2017–2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2), 179–188.
- Dewi, W. K., Anindya, A. A., Ariyani, L., & Wicaksono, D. A. (2025). Peran strategis Pemerintah Kota Medan dalam penguatan pengelolaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023. *Journal of Education and Culture (JOECY)*, 5(2), 14473–14486. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1529>
- Ellitan, L. (2020). Kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 88–97.
- Fazhillah, N., Putri, R. A., & Hidayat, M. (2024). Pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 11(1), 66–77.
- Handriyani, N. K. S., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 13(3), 1021–1030.
- Hidayah, S., & Suryono, B. (2021). Efektivitas distribusi SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Indriany, A., Lestari, D. M., & Afriani, R. I. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, sistem pembayaran online dan tingkat penghasilan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(4), 12–26. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i4.923>.
- Kesek, M., Takakobi, R. B., & Sonu, S. S. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 65–78.
- Khairunnisa, A. (2025). Pengaruh distribusi SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 7(1), 50–61.
- Marpaung, R., Sitompul, D., & Hutabarat, J. (2023). Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Riset Perpajakan*, 8(2), 77–89.
- Martadinata, I. P. H., & Yasa, I. N. P. (2022). *The role of taxpayer trust and awareness on voluntary compliance: An experimental study*. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 7(2), 184–199. <https://doi.org/10.23887/jia.v7i2.43346>
- Maulana, F. (2025). Pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 21–30.
- Meita, I., & Nurdiniah, D. N. (2023). Pengaruh perubahan tarif PPh badan, inflasi, dan suku bunga terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA)*, 10, 1–14.

- Mustofa, A. (2020). Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 55–63.
- Paramananda, I. K. D., & Diatmika, I. P. G. (2025). Efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2019–2023. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JIAH)*, 14(2), 52–63. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJAKUN/article/view/99170>
- Prastyantini, D., & Rizki, M. (2022). Pengaruh distribusi surat pemberitahuan pajak terutang terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 140–150.
- Putra, I. G. N. A., & Yasa, I. N. M. (2024). Analisis tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 145–156.
- Putra, S., & Putra, I. G. A. M. A. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(1), 36–46.
- Putri, N. A., Siregar, N. E., & Nasution, K. J. (2025). *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 325–333. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1176>
- Ramadhani, N. (2023). Pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 5(1), 34–45.
- Saputra, I. G. A., & Putra, I. G. A. M. A. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(1), 36–46.
- Setyaedhi, I. M. D. (2024). *Comparative Test of Cronbach's Alpha Reliability Coefficient, Kr-20, Kr-21, And Split-Half Method*. *Journal of Education Research and Evaluation*, 8(1), 47–57.
- Sintia, N., Wahyuni, M. A., & Sujana, E. (2022). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan analisis statistik parametrik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 13(2), 455–466.
- Suardewa, I. G. A. (2024). *The impacts of preservice English teachers' self-efficacy of using AI towards their intentions of teaching writing skills using AI*. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha*, 12(1), 110–119.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tasmita, Y. N., & Dahniar, D. (2022). Perubahan tarif pajak penghasilan final UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Tangible Journal*, 7(2), 171–176. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.302>
- Tauhid, M., Rahman, A., & Sari, P. (2025). Pengaruh distribusi SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). *Jurnal Akuntansi*

- dan Perpajakan Daerah*, 8(1), 11–22.
- Tiara, N. P. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 102–112.
- Trisnayani, N. L. P. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 15(2), 145–156.
- Yasa, I. N. P., Dharmawan, N. A. S., Adiputra, I. M. P., Martadinata, I. P. H., & Herawati, N. T. (2021). *Tax comprehension and ethics education integration in improving tax compliance among accounting students: An experimental study*. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(1), 96–108. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i1.1159>
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). *Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance*. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>